

# TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA SORONG PERIODE 2012 – 2017

Syafi'i Katmas<sup>1</sup>, Hermanto Suaib<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sorong

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna dibalik realita. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Sorong yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong, sedangkan Sampelnya 5 orang yang terdiri dari 3 Pejabat dan 2 Masyarakat. Dari hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini bahwa Partisipasi masyarakat terhadap Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Sorong sangat meningkat bila dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya, dimana jumlah pemilih tetap ± 153.973 jiwa, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih ± 106.931 jiwa dan yang tidak menggunakan hak pilih ± 47.042 jiwa.

Kata Kunci: Partisipasi, Walikota, Wakil Walikota, Kota Sorong

## PENDAHULUAN

Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong bisa di katakan sangat tinggi hal ini terlihat karena begitu banyaknya masyarakat yang datang ketempat pemungutan suara ( TPS ) faktor ini menandakan bahwa pemahaman masyarakat tentang pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong sudah begitu luas dan masyarakat sudah begitu pintar dalam memilih para pasangan calon kandidat mereka juga menyadari bahwa suara mereka yang akan menentukan maju dan berkembangnya Kota Sorong kedepan, namun masih ada sebagian kecil warga masyarakat Kota Sorong yang masih bersifat apatis atau masa bodoh dengan pemilihan yang di selenggarakan hal ini mungkin di sebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Rasa kepercayaan masyarakat terhadap para pasangan calon kandidat sudah tidak ada lagi, ini disebabkan karena para calon kandidat sebelum mereka terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota mereka memberikan banyak janji dan harapan kepada masyarakat namun ketika mereka terpilih janji-janji dan harapan yang mereka katakan itu tidak ditepati faktor inilah yang membuat sebagian kecil masyarakat yang tidak mau memberikan hak pilihnya.
2. Kurangnya sosialisasi politik kepada masyarakat, sosialisasi politik merupakan salah faktor penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa suara mereka sangat berguna

dalam pemilihan yang dilakukan apabila sosialisasi politik tidak dilakukan maka masyarakat tidak begitu antusias untuk mengikuti pemilihan yang diselenggarakan.

3. Masalah pekerjaan dan tempat tinggal masyarakat yang jauh dari TPS (tempat pemungutan suara), ada sebagian warga Kota Sorong yang memang mempunyai tugas diluar Kota Sorong namun berdomisili di Kota Sorong dan tidak berada ditempat pada saat pelaksanaan pemilihan ada juga sebagian kecil masyarakat yang memang dengan sengaja tidak mau datang ketempat pemungutan suara masyarakat ini yang harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah dan komisi pemilihan umum ( KPU ).

Oleh karena itu di harapkan peran pemerintah dan instansi terkait yaitu KPU ( komisi pemilihan umum ) untuk lebih giat lagi memberikan sosialisasi politik kepada masyarakat dan membangun kembali rasa kepercayaan masyarakat kepada para pasangan calon kandidat agar kedepannya semua masyarakat semua ikut memilih, begitu juga sebalik dengan masyarakat apabila pemerintah dan instansi terkait yaitu KPU ( komisi pemilihan umum ) sudah memberikan pemahaman-pemahaman mengenai pelaksanaan pemilihan dan betapa pentingnya keterlibatan masyarakat didalam pemilihan yang diselenggarakan maka masyarakat harus sadar bahwa suara mereka dan peran serta masyarakat sangat bermanfaat dan berguna untuk mensukseskan pemilihan yang dilakukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tingkat Partisipasi Masyarakat**

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dapat dikatakan sangat tinggi karena hampir semua masyarakat Kota Sorong memberikan hak pilih hanya sebagian saja yang tidak memberikan hak pilihnya, hal ini di sebabkan karena peran Komisi Pemilihan umum (KPU) yang mana telah memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan partisipasinya dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong.

Sosialisasi yang dilakukan adalah publikasi melalui RRI dan CWM, Selama masa pemutahiran anggota-anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) turung langsung kelapangan, Pawai keliling untuk untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat Kota Sorong yang mempunyai hak pilih untuk segera mengecek namanya dan telah ditanamkan tugas sosialisasi kepada seluruh struktur BPD, BPS sampai ke TPS.

Berikut ini adalah wawancara peneliti dengan wakil Walikota Kota Sorong :

Pertanyaan : *“Menurut Ibu, bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan Walikota dan Wakil Walikota serta kelebihan apa yang Ibu miliki sehingga masyarakat begitu antusias mendukung Ibu?”*

Jawaban : *“Tingkat partisipasi masyarakat begitu tinggi hal ini terlihat dari begitu banyak yang memberikan hak pilihnya hanya sebagian kecil saja yang bersifat apatis. Menurut ibu wakil Walikota beliau dapat terpilih sebagai wakil walikota karena saya orangnya jujur, ikhlas, pekerja keras, peduli terhadap sesama, berjiwa sosial dan saya orangnya apabila sudah mengeluarkan suatu perkataan maka saya berkomitmen dengan apa yang saya katakan serta saya orang yang selalu menganggap bahwa masyarakat itu semua sama tanpa membedakan ras, suku dan agama. Serta tujuan saya untuk mencalonkan diri yaitu untuk mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan pembangunan di kota sorong.”*

Berikut ini adalah wawancara peneliti dengan Ketua KPU kota sorong:

Pertanyaan : *“Hal-hal apa saja yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong untuk meningkatkan partisipasi masyarakat?”*

Jawaban : *“Yang pasti untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah sosialisasi publikasi makanya untuk pemilihan Walikota kemarin selama masa pemutahiran satu bulan penuh selalu di publikasi lewat RRI dan CWM selama masa pemutahiran kemudian kita juga turun lapangan langsung, pawai keliling untuk memberi tahu masyarakat segera mengecek namanya yang kedua kemudian struktur kita BPD, BPS sampai TPS semuanya sudah melekat pada diri mereka tugas sosialisasi menurut ketua KPU tingkat partisipasi tertinggi di atas tujuh puluh persen adalah pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di bandingkan dengan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif sedangkan konflik yang terjadi hanyalah di buat oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.”*

Berikut ini adalah wawancara peneliti dengan salah satu partai pengusung:

Pertanyaan : *“Syarat apa saja yang harus dimiliki oleh Partai Politik untuk bisa mengusung calon Walikota dan Wakil Walikota?”*

Jawaban : *“persyaratakan untuk mengusung para kandidat semuanya sudah ada dalam UU dan peraturan pemerintah semuanya sudah jelas ada di UU partai politik UU pemilih kita tidak bisa melengser dari aturan siapa pun orangnya apa bila dia memiliki persaratan sebagai kepala daerah sesuai aturan maka dia berhak mendapat dukungan kalau di dalam UU partai politik apabila apabila partai politik tersebut mendapat kursi di DPR sebanyak lima belas persen maka partai tersebut berhak memberikan dukungan kepada calon kepala daerah apabila tidak mencukupi maka dapat berkoalisi dengan partai lain.”*

Berikut ini adalah wawancara peneliti dengan masyarakat:

Pertanyaan : *“Menurut Bapak, apakah tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan Walikota dan Wakil Walikota begitu tinggi atau rendah dan apa saja yang menyebabkan sehingga sebagian masyarakat tidak menyalurkan hak pilihnya?”*

Jawaban : *“Partisipasi masyarakat begitu tinggi beliau juga mengatakan bahwa semua warga masyarakat di kompleks kokoda semuanya memberikan hak pilihnya. Beliau juga mengatakan bahwa telah mengajak semuaarganya untuk*

*memberikan hak pilihnya. Ada juga yang mengatakan bahwa saya tidak memberikan hak pilih saya karena faktor pekerjaan.”*

Dari semua wawancara yang telah penulis lakukan maka penulis dapat katakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota begitu tinggi hal sesuai dengan data dan fakta di lapangan di perkuat dengan data-data yang telah penulis peroleh dari Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong (KPU) yaitu:

Tabel 1. Pemilih yang menggunakan hak pilih dan DPT dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Sorong periode 2012-2017.

No	Distrik	Jumlah pemilih tetap	Menggunakan hak pilih	Tidak menggunakan hak pilih
1	Sorong	6,305	4,475	1,830
2	Kepulauan	28,005	19,047	8,958
3	Sorong Barat	27,280	18,959	8,321
4	Sorong	34,703	23,735	10,968
5	Sorong Manoi	21,741	15,964	5,777
6	Sorong Timur Sorong Utara	35,939	24,751	11,188
<b>Total</b>		<b>153,973</b>	<b>106,931</b>	<b>47,042</b>

*Sumber : KPU Kota Sorong*

## **KESIMPULAN**

Dari hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Partisipasi masyarakat terhadap Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Sorong sangat meningkat bila dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya, dimana jumlah pemilih tetap  $\pm$  153.973 jiwa, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih  $\pm$  106.931 jiwa dan yang tidak menggunakan hak pilih  $\pm$  47.042 jiwa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Syani. 1995. *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat..* Penerbit : PT. dunia Pustaka Jaya Anggota IKAPI, Jogjakarta.

- Abdullah Taufik dan Van Der Leeden. 1986. *Durkheim Pengantar Sosiologi Moralitas..* Penerbit : Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Bungin Burhan. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif. "Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer"*. Penerbit : P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ebyhara Abu Bakar, 2010. *Pengantar Ilmu Politik*. Cetakan Pertama. Penerbit : AR-RUZZ MEDIA, Depok, Sleman. Jogjakarta.
- Giddens Anthony. 1986. *Kapitalisme dan Teori Sosial Moderent "Suatu Analisis Karya-Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber"*. Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Lysen. A. 1984. *Individu dan Masyarakat*. Penerbit : P.T. Sumbang Bandung, Bandung.
- Margaret M. Poloma. 2007. *Sosiologi Kontemporer*. Penerbit :. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Philipus. Ng.-Aini Nurul, 2004. *Sosiologi dan Politik..* P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pruit. G Dean - Rubin. Z Jeffrey. 1986. *Teori Konflik Sosial*. Penerbit : Pustaka Pelajar. Jogjakarta.
- Soekanto Soejono. dan Lestari Ratih. 1988. *Fungsionalisme dan Teori Konflik Dalam Perkembangan Sosiologi*. Penerbit Sinar Grafika, Jogjakarta.
- S, H, Sarundajang. 2011. *Babak Sistem Pemerintahan*. Penerbit Kata Hasta Pustaka, Jakarta.
- H. Inu Kencana Syafiiie. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Penerbit PT Refika Aditama, Bandung.
- Undang-Undang 32 Tahun 2004
- Peraturan Pemerintah Nomor.49 Tahun 2008